

**PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL OLEH MITRA  
(FMU Roles on Social Forestry Program which conducted by Partners)**

**CHRISTINE WULANDARI**

Program Studi Magister Kehutanan – Universitas Lampung  
Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Bandarlampung 35145

Email: [christine.wulandari@fp.unila.ac.id](mailto:christine.wulandari@fp.unila.ac.id) ; chs.wulandari@gmail.com

**ABSTRACT**

The Forest Management Unit (FMU), also known as Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), has the responsibility to save and conserve the forest as well as maintain its function. In order to fulfil the task, collaboration with a strong commitment for forest conservation and local people prosperity among the FMU and other related stakeholders is necessary. According to Ministry of Environment and Forestry Decree No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 it is stated that there are several Social Forestry (SF) Programmes which FMU has to conduct in doing their responsibilities and answering existing challenges in the field. This research uses Force Field Analysis (FFA) to discover the value as well as supporting and inhibiting factors of partnership in FMU, both internally and externally. Based on the FFA results, it is revealed that the strongest internal supporting factor is the clarity of benefit sharing in SF among the stakeholders. Meanwhile for the external factor, it is the occurrence of high demand of the commodity that is managed in the partnership. For the strongest inhibiting factor, the internal one comes from the existing situation where there are still local people live in the forest. While the external factor is the price instability of forest commodity. In principle, the SF program implementation is one of FMU Head responsibilities in operating the organisation, particularly when there are challenges in the field. By acknowledging the factors that can support and inhibit them through this study, an effective strategy to conduct the forestry program with partners can be made.

Keywords: *Social Forestry, FMU roles, Partnership*

**PENDAHULUAN**

Pada kurun waktu sepuluh tahun ini hutan di Provinsi Lampung masih tetap alami pemasalahan yang hampir serupa dari tahun ke tahun yaitu menurunnya luasan hutan akibat adanya perambahan. Berdasarkan data terakhir yang diinfokan oleh Walhi Provinsi Lampung dan dilansir oleh [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) pada tanggal 25 Februari 2018, diketahui bahwa saat ini mencapai 65% dari total luas hutan di Lampung telah rusak. Menurut Karsudi *et al.* (2010) salah satu penyebab terjadinya perluasan kerusakan hutan di tingkat lapang adalah karena lemahnya tata kelola lembaga yang mengelola hutan tersebut. Artinya, diperlukan adanya lembaga yang bisa dan mampu beroperasi secara optimal di tingkat lapang. Dalam menjawab tantangan ini, Pemerintah Indonesia cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan kebijakan yaitu dioperasionalkannya Unit Pengelola Hutan (*Forest Management Unit* atau FMU) yang biasa disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2017, Provinsi Lampung dengan luasan total hutan 1.004.735 hektar memiliki 15 KPH yang terdiri atas 10 KPHL, 4 KPHP dan 1 KPHK.

Khusus untuk menjawab pemasalahan perambahan maka KPH hendaknya melaksanakan program perhutanan sosial yang harus mempertimbangkan kondisi sosial secara cermat dalam

menjalankan setiap programnya. Khusus tentang Perhutanan Sosial telah keluar peraturannya di tahun 2016 atau lengkapnya berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 yang harus menjadi acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Disamping itu KPH juga harus pula mempertimbangkan aspek ekonomi dan ekologi yang ada di lingkungannya. Harus ada keseimbangan ketiga aspek tersebut dalam menjalankan suatu program kehutanan di lapangan agar tujuan program dapat tercapai (Wulandari dan Budiono, 2016). Lesson learned tentang perlunya keseimbangan 3 aspek tersebut telah dibuktikan ketika implementasi program pemberdayaan masyarakat lebih dari 5 tahun di Tahura Register 19 dan di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS (Wulandari *et al.*, 2014; Wulandari dan Inoue, 2018). Bila hanya memperhatikan salah satu aspek maka capaian program tidak akan optimal karena masyarakat tetap memerlukan adanya kecukupan kebutuhan keseharian. Aspek ekonomi dan pemanenan hasil hutan akan dapat berkelanjutan jika kondisi ekologi KPH tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian bisa dipahami kompleksitas yang ada dalam mengimplementasikan suatu program sehingga KPH memerlukan mitra agar tetap dapat menjaga adanya keseimbangan 3 aspek tersebut dalam mengoperasionalkan suatu program perhutanan sosial.

Kondisi nyata perlunya ada keseimbangan 3 aspek tersebut ketika implementasikan program dapat ditemui di salah satu unit yaitu di KPH Batutege yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan lindung. Kepala KPH ini menerapkan beberapa skema dalam menjaga kelestarian hutan disesuaikan dengan kondisi di lapang, yaitu kemitraan dan HKM. Pada 2 skema yang dijalankannya KPH Batutege berusaha untuk bisa menggandeng mitra, baik itu kelompok masyarakat, pemerintah, LSM ataupun swasta. Kondisi serupa dalam menggandeng mitra untuk implemantasikan program juga dilakukan oleh hampir semua KKP di Provinsi Lampung, termasuk kemitraan di KPH Gedong Wani dan Way Terusan yang merupakan hutan produksi.

Sulistiyani (2004) maupun Sarjono dan Wulandari (2014) menyebutkan bahwa bekerjasama dengan mitra atau bermitra atau kemitraan bisa mempunyai arti bentuk suatu persekutuan oleh berbagai pihak, yaitu dua pihak maupun lebih. Persekutuan ini adalah suatu ikatan kerja sama berdasar adanya kesepakatan para pihak yang saling memerlukan dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan suatu usaha dan tujuan tertentu sehingga bisa memperoleh hasil lebih baik. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kemitraan bisa terjadi jika empat persyaratan sebagai berikut ini terpenuhi, yaitu:

- a. Merupakan dua pihak ataupun lebih,
- b. Punya kesamaan dalam visi untuk suatu capai tujuan,
- c. Mempunyai kesepakatan antara pihak-pihak yang lakukan kemitraan,
- d. Pihak-pihak yang bekerjasama merasa saling memerlukan satu sama lain.

Keempat syarat tersebut adalah syarat minimum untuk dapat diberlangsungkannya program kemitraan di suatu wilayah sehingga diharapkan bisa menguntungkan bagi semua pihak yang bermitra atau kemitraan yang mutualistik atau mutualism partnership (Sulistiyani, 2004). Berdasarkan cermatan di lapang ternyata tidak semua kemitraan bersifat *mutualistic* karena ada pula yang merupakan kemitraan semu (*Pseudo partnership*) atau kemitraan sebagai proses peleburan atau pengembangan program yang telah dilakukan mitra (*Conjugation partnership*). Dengan demikian kemitraan tersebut belum tentu akan menguntungkan bagi masyarakat. Penelitian ini melakukan cermatan kemitraan dalam lingkup perhutanan sosial atas kecenderungan yang terjadi di Provinsi Lampung.

Pada dokumen usulan percepatan PS bulan Agustus tahun 2018 Provinsi Lampung diketahui bahwa sebagian besar atau 45 dari 70 (64,29%) usulan para KKP akan mengembangkan program kemitraan. Mengapa demikian? Hingga saat ini belum ada penelitian tentang kondisi tersebut. Apa sebenarnya tujuan kemitraan yang mereka jalin? Bagaimana mereka dapat mewujudkan kemitraan dengan spesifikasi yang sesuai agar tujuan programnya tercapai? Apa peran mereka dalam kemitraan tersebut? Bagaimana cara mereka menyusun strategi dalam bermitra? Berdasarkan beberapa pertanyaan tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan: Mengidentifikasi dan Memformulasikan Peran KPH yang ideal terhadap Program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh Mitra.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2018. Sampel penelitian adalah KPH yang akan dan sudah mempunyai program Kemitraan, yaitu KPH Batutegei, KPH Gedung Wani dan KPH Way Terusan. Langkah Selanjutnya adalah pemberian nilai untuk setiap faktor pendorong dan penghambat oleh 7 orang yaitu pakar dan pejabat di KPH dan Dinas Kehutanan yang relevan dalam mengurus kemitraan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan pengumpulan datanya berupa faktor-faktor penghambat dan pendorong dengan memakai metode snowball untuk setiap KPH. Selanjutnya perumusan data yang diperoleh menggunakan analisis medan daya atau *Force Field Analysis*. Analisis ini berasal dari Kurt Lewin, kemudian dikembangkan Morgan (2008), lalu dan diterapkan Singer (2009) secara partisipatif untuk analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya suatu perubahan. Peran KKPH akan dapat dideskripsikan setelah diketahui apa saja dan posisi dari setiap faktor pendorong dan penghambat dalam bermitra di KPH tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pendukung internal yang tertinggi nilainya adalah kemitraan menghasilkan benefit sharing yang lebih jelas, diikuti dengan masyarakat memerlukan lahan kelola sehingga mereka mau mengelola lahan dengan skema kemitraan, selanjutnya karena masyarakat harus memenuhi kebutuhan ekonominya secara berkelanjutan. Faktor pendukung pertama, adanya pembagian keuntungan yang jelas juga mempunyai posisi penting dalam penelitiannya Andersson *et al.* (2011) tentang kemitraan dalam perusahaan hasil hutan kayu.

Adanya permintaan yang tinggi, perolehan izin kemitraan lebih simpel, ketersediaan sumberdaya hutan dan dukungan pemda adalah faktor-faktor eksternal yang secara berurutan mendukung implementasinya program kemitraan antara KPH dengan masyarakat. Tingginya permintaan hasil hutan kayu juga menjadi faktor pendorong adanya program kemitraan dalam penelitiannya Andersson *et al.* (2011), juga dalam penelitiannya Wulandari dan Budiono (2016) di Kemitraan yang terjadi di Way Kanan, Provinsi Lampung. Sempelnya proses perizinan memang sangat mungkin jadi faktor pendorong terjadinya kemitraan di KPH, terutama sebelum terbitnya Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018. Ketika implementasi harus berdasarkan Perdirjen terbaru tersebut maka sesungguhnya proses pengembangan kemitraan tidak lagi sesimpel sebelumnya. Terkait dengan ketersediaan sumberdaya alam, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wulandari *et al.* (2018) tentang kemauan masyarakat untuk mengikuti program kemitraan konservasi karena adanya sumberdaya alam hayati yang dapat mereka manfaatkan.

Adapun faktor penghambat internal yang tertinggi nilainya adalah masih banyaknya masyarakat yang bermukim dalam hutan sehingga harus segera dicari jalan keluarnya agar mereka tidak lagi bermukim dalam hutan, kemudian faktor modal karena dalam bermitra masyarakat memerlukan modal awal yang tidak sedikit. Pada posisi ketiga yaitu minimnya keahlian yang dimiliki masyarakat untuk mengembangkan program kemitraan misal lewat modifikasi hasil.

Banyak penelitian yang membuktikan bahwa lama masyarakat bermukim di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap suatu program termasuk kemitraan sebagaimana penelitian Siteo and Guides (2015) di Mozambique dan Hamdan *et al.* (2017) di Sulawesi Selatan. Periode bermukim berpengaruh, demikian pula dengan jumlah pemukimnya. Adanya banyak masyarakat yang bermukim dalam hutan lindung maupun hutan produksi menjadikan implementasi program kemitraan tidak bisa berjalan secara optimal karena peraturan kehutanan di Indonesia melarang adanya pemukiman di 2 kawasan hutan tersebut. Disisi lain, masih ditemukan di lapangan bahwa sesungguhnya masyarakat ingin memiliki kawasan hutan tempat mereka bermukim sehingga ketika ada program pemerintah diaplikasikan maka mereka akan sangat berhati-hati dalam menerimanya. Hal ini adalah pemasalahan yang spesifik ditemukan dalam pembangunan kehutanan di Indonesia karena banyak kawasan hutan

yang sudah tidak berhutan lagi namun sudah merupakan suatu kawasan pemukiman yang lengkap dengan berbagai sarana umum termasuk kantor kepala desa.

Urutan nilai tertinggi untuk variabel penghambat eksternal yaitu fluktuasi harga pasar, kemudian minim kapasitas untuk bisa akses informasi pasar, dan minimnya respon lembaga keuangan untuk bisa memberikan pinjaman atau hibah ke kelompok masyarakat yang bermitra dengan KPH. Selain itu juga jaringan pasar yang masih terbatas juga jadi pembatas eksternal. Fluktuasi harga pasar komoditas menjadi penghambat karena masyarakat belum mempunyai akses yang memadai terhadap informasi harga pasar. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap persepsi dan kemauan masyarakat untuk bermitra. Bayrak dan Marafa (2016) telah menemukan bahwa fluktuasi harga komoditas yang dihasilkan berpengaruh terhadap diselenggarakannya program REDD. Dengan demikian diperlukan peran yang spesifik dari KKPH untuk mengatasi pemasalahan ini. Salah satu KKPH lokasi penelitian telah lakukan program memotong jalur pemasaran hasil hutan dari produsen atau masyarakat langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Upaya ini membuat harga komoditas lebih stabil dan lebih pasti margin (keuntungan) yang didapat oleh masyarakatnya.

Berdasarkan 4 kategori faktor pendukung dan faktor penghambat yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang terlihat pada Tabel 1. maka dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan bagi para KKPH dalam bermitra dengan kelompok masyarakat.

Tabel 1. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Program Perhutanan Sosial oleh Mitra KPH

<b>Faktor pendorong (Driving factors)</b>		<b>Faktor penghambat (Restraining factors)</b>	
Internal (positif)	Nilai	Internal (negatif)	Nilai
kelompok masyarakat siap mendukung program kemitraan	18	Belum adanya tokoh masyarakat yang berkomitmen dalam kemitraan di KPH	22
masyarakat sangat memerlukan adanya lahan untuk digarap	22	terjadinya pergeseran tanggungjawab dan peran pengelolaan sumberdaya hutan dari tingkat kabupaten ke provinsi	19
pengelola KPH yang dinamis dan berperan aktif	18	masih adanya pemukiman dalam hutan.	25
Motivasi peningkatan kesejahteraan masyarakat (ekonomi)	21	ditemui SPPT pada lahan-lahan hutan.	21
Masyarakat memahami bahwa fungsi ekologi berpengaruh terhadap fungsi ekonomi lahan kelola mereka	19	Masyarakat kurang modal untuk mengelola dan mengembangkan lahan kelolanya	24
pembagian keuntungan skema kemitraan lebih jelas	25	Minimnya keahlian masyarakat dalam mengelola pasca hasil hutan bukan kayu secara teknis	23
		Rendahnya posisi tawar kelompok masyarakat dalam	16

		perdagangan HHBK	
Eksternal (positif)		Eksternal (negatif)	
adanya dukungan dari pemda.	19	Pemerintah belum menerbitkan dasar hukum untuk operasional kemitraan yang khusus bagi KPH dan mitranya	19
kelompok masyarakat mengetahui bahwa izin operasional secara kemitraan lebih sederhana dan cepat diperoleh dibanding izin perhutanan sosial lainnya	22	terjadinya fluktuasi harga atas komoditi-komoditi yang dibudidayakan kelompok masyarakat	23
tersedia potensi sumberdaya hutan yang siap dikelola bersama mitra	19	Masyarakat belum mempunyai akses informasi harga pasar	22
Ada permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap komoditas hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	25	Minimnya respon dari lembaga atau institusi keuangan untuk keberlanjutan operasionalnya kelompok masyarakat	21
ada pihak lain yang bersedia mendukung pelaksanaan kemitraan misal universitas, LSM	15	Minimnya investor yang bersedia bermitra	20
		Minimnya jaringan pasar HHBK yang dimiliki masyarakat dan pemerintah	21

Sumber: Data Primer, 2018

Sebagai langkah berikutnya, dalam lakukan analisis FFA secara partisipatif dan bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi di lapang, menurut Singer (2009) diperlukan adanya diskusi kelompok bersama masyarakat setempat dan mitra dalam rumuskan: (a) penguatan terhadap faktor-faktor pendorongnya, dan (b) minimalkan adanya faktor-faktor penghambat untuk dapat terjadinya suatu perubahan positif. Dua rumusan tersebut dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan jika pihak yang bermitra paham akan fungsinya dalam kemitraan yang mereka bangun.

Alternatif yang bisa diambil untuk dapat aplikasikan kemitraan secara optimal adalah mempertimbangkan fungsi pihak-pihak yang bermitra. Hanapiah (2009) menyatakan bahwa jika pihak yang bermitra adalah pemerintah, swasta dan masyarakat maka:

- a. Pemerintah mempunyai fungsi yang terkait dengan pelayanan publik dan kebijakan baik membuat, mengendalikan, mengawasi kebijakan yang digunakan atau yang sesuai.
- b. Swasta mempunyai fungsi menggerakkan aktivitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara umum.
- c. Masyarakat mempunyai fungsi:
  - 1) Sesuai dengan posisinya: subjek dan atau juga sebagai objek dari program kemitraan
  - 2) Turut aktif sebagai pengontrol atas kinerja swasta juga pemerintah.

### KESIMPULAN

Faktor-faktor pendukung dan penghambat hasil penelitian ini hendaknya jadi pertimbangan bagi para KKPH dalam mengembangkan suatu program kemitraan. Faktor pendukung internal dalam

pengembangan kemitraan secara berurutan dari yang tertinggi scorenya adalah kejelasan pembagian keuntungannya (*benefit sharing*), kebutuhan masyarakat akan lahan kelola dan pendapatan yang kontinyu. Adapun faktor pendukung eksternalnya yaitu tingginya permintaan konsumen atas komoditas tertentu, proses izin kemitraan yang sederhana dan ketersediaan suatu jenis sumberdaya hutan yang memadai. Selain pertimbangan faktor pendukung, pengembangan kemitraan hendaknya juga pertimbangan faktor penghambat internal dan eksternal yang secara berurutan adalah sebagai berikut banyaknya masyarakat bermukim dalam hutan, minimnya modal dan keahlian yang dimiliki masyarakat, fluktuasi harga komoditas, belum memadainya akses informasi pasar dan respon lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andersson K, Ravikumar BA, Mwangi E, Guariguata M, Nasi R. 2011. Menuju Bentuk Kerjasama yang Lebih Berkesetaraan Kontribusi Masyarakat Lokal bagi Koneksi Pengusahaan Kayu. Occasional Paper 72. CIFOR, Bogor. 52 P
- Bayrak MM, Marafa LM. 2016. Review Ten Years of REDD+: A Critical Review of the Impact of REDD+ on Forest-Dependent Communities. Sustainability 2016, doi:10.3390/su8070620 [www.mdpi.com/journal/sustainability](http://www.mdpi.com/journal/sustainability)
- Hamdan, Achmad A, Mahbub AS. 2017. Persepsi Masyarakat terhadap Status Kawasan Suaka Margasatwa Ko'mara Kabupaten Takalar. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9 (2): 105-113, Desember 2017 ISSN: 1907-5316. ISSN ONLINE: 2613-9979
- Hanapiah, Pipin. (2009) Good Governance, Membangun Masyarakat Yang Demokratis Dan Nasionalis. Bandung: Universitas Padjadjaran. Bandung
- Karsudi, Soekmadi R, Kartodihardjo H. 2010. Model pengembangan kelembagaan pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan di Provinsi Papua (Institution development model forest management unit in Papua Province). *Journal of Tropical Forest Management*. 16(2):92–100.
- Morgan, Royston. 2008. "How to Do a Force Field Analysis - The Seven Steps." "How to do a Force Field Analysis" The Seven Steps Enzine Articles.com. <http://ezinearticles.com/?How-to-Do-a-Force-Field-Analysis---The-Seven-Steps&id=1752747>
- Sarjono MA, Wulandari, C. 2014. Kemitraan KPH dan Masyarakat. In: Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 187P. p. 135-154
- Singer, Paula M. 2009. The Infopeople Project *dalam* Leading Change - Winter, supported by the U.S. Institute of Museum and Library Services. California. [Http://infopeople.org/training/past/2009/bls\\_leading\\_change/ex3\\_force\\_field.pdf](http://infopeople.org/training/past/2009/bls_leading_change/ex3_force_field.pdf) Diakses pada tanggal 17 Juni 2014.
- Sitoe AA, Guedes BS. 2015. Community Forestry Incentives and Challenges in Mozambique. *Forests* 2015, 6, 4558–4572; doi:10.3390/f6124388 [www.mdpi.com/journal/forests](http://www.mdpi.com/journal/forests)
- Sulistiyani AT. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gaya Media. 129 P

- 
- Wulandari C, Budiono P, Yuwono SB, Herwanti S. 2014. Adoption of agro-forestry patterns and crop system around Register 19 Forest Park, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20 (2): 86—93.
- Wulandari C, Budiono P. 2016. Social Capital Status on HKm Development in Lampung Province. Proceeding The International Conference of Indonesia Forestry Researchers III. Bogor, 21-22 October 2015. ISBN 978-979-8452-71-0. p.19-26
- Wulandari C, Budiono P. 2016. Food Security under Partnership Scheme at Production Forest Register 42 Way Kanan. Proceeding of USR International Smeinar on Food Security "Improving Food Security : The Challenges for Enhancing Resilience to Climate Change. Emersia Hotel and Resort, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. 23 – 24 August 2016 Volume II p 29-37
- Wulandari C, Inoue M. 2018. The Importance of Social Learning for the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of Community Forestry in Lampung Province. *Small-scale Forestry* <https://doi.org/10.1007/s11842-018-9392-7>
- Wulandari C, Bintoro A, Rusita, Santoso T, Duryat, Kaskoyo H, Erwin, Budiono P. 2018. Community forestry adoption based on multipurpose tree species diversity towards to sustainable forest management in ICEF of University of Lampung, Indonesia. *Biodiversitas* 19 (3) : 1102-1109 DOI: 10.13057/biodiv/d190344

Links:

<http://www.beritasatu.com/nasional/480371-walhi-kerusakan-hutan-di-lampung-mencapai-65-persen.html> Walhi: Kerusakan Hutan di Lampung Mencapai 65 Persen